

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan tinjauan, data, dan hasil wawancara yang diperoleh dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bekasi serta hasil wawancara dengan salah satu anggota Asosiasi Pengacara Pengadaan Barang dan Jasa Indonesia, adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Bekasi mengedepankan asas kemanfaatan dari setiap tahapan pengadaan terutama jenis pengadaan pekerjaan konstruksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Asas kemanfaatan ini juga berkaitan dengan prinsip efektif dan efisien yang pada intinya pengadaan pekerjaan konstruksi mengedepankan kewajaran harga disamping kualitas bangunan yang baik (*value for money*), serta pengerjaan yang tidak memakan waktu yang lama. Asas kemanfaatan juga dimaksudkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak yang berkaitan dengan prinsip terbuka PBJ. Seluruh penyedia baik di dalam maupun diluar Kabupaten Bekasi dapat mengikuti proses tender atau seleksi sehingga bisa bermanfaat bagi penyedia itu sendiri disamping bermanfaat bagi pengguna jasa dan masyarakat dengan hasil pekerjaan yang baik.

2. Penerapan asas kemanfaatan pada pekerjaan konstruksi pengadaan barang atau jasa di Kabupaten Bekasi memiliki beberapa kendala. Mulai dari pengetahuan yang kurang dari sisi regulasi dan hukum dari banyak pihak (yang dalam hal ini Pemerintah dan Penyedia), banyak dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak melakukan identifikasi kebutuhan secara komprehensif pada tahap perencanaan, komunikasi yang kurang efektif antar dinas dan organisasi perangkat daerah, regulasi yang dianggap kurang jelas, kurang lengkap, dan multitafsir, kurangnya pegawai yang memiliki sertifikasi untuk melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi, dan Penyedia tidak teliti dalam menyediakan dokumen dan berkas yang dibutuhkan dalam pengadaan terutama jenis pengadaan pekerjaan.

3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah memiliki upaya-upaya untuk menanggulangi dan menyelesaikan kendala penerapan asas kemanfaatan tersebut. Upaya tersebut nampak dari BPBJ Kabupaten Bekasi memiliki tim pendampingan yang disebar pada setiap Dinas atau Organisasi Perangkat Daerah terkait melaksanakan pengadadaan, memiliki tim pembinaan untuk Penyedia, melaksanakan seminar, bimbingan teknis, dan pelatihan bagi para pegawai Dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Melakukan pelatihan dan uji kompetensi

sertifikasi pengadaan dan pelatihan pejabat fungsional pengadaan, serta melaksanakan pembinaan, advokasi, dan seminar penyelesaian kasus-kasus tertentu bidang pengadaan bagi para Penyedia.

B. Saran

Mengacu pada pembahasan dan kesimpulan yang sudah diuraikan sebelumnya, maka Penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Bekasi perlu memiliki tolok ukur atau ukuran keberhasilan dari penerapan asas kemanfaatan pada pekerjaan konstruksi pengadaan barang atau jasa agar dapat melakukan evaluasi dan perbaikan pada setiap pengadaan yang ada. Tolok ukur yang dapat digunakan adalah instrumen dalam teori hukum keuangan negara. Instrumen yang dapat menjadi tolok ukur keberhasilan penerapan asas kemanfaatan adalah keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).
2. Pengadaan pekerjaan konstruksi diharapkan mengedepankan pemakaian produk dalam negeri sebagaimana dalam Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penggunaan produk dalam negeri ini dimaksudkan juga untuk mencapai tujuan pengadaan

barang atau jasa pemerintah sebagaimana dalam Pasal 4 Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir melalui Perpres Nomor 46 tahun 2025.

3. Pemerintah menerima aspirasi masyarakat terkait dengan pekerjaan konstruksi yang dibutuhkan masyarakat Kabupaten Bekasi. Penerimaan aspirasi oleh masyarakat ini dilakukan agar pada tahap identifikasi kebutuhan dalam perencanaan pengadaan, segala kebutuhan yang direncanakan terutama pada jenis pekerjaan konstruksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan membawa kemanfaatan bagi masyarakat.
4. Pemerintah melaksanakan pendampingan dan pelatihan secara maksimal dan konsisten kepada pegawai pemerintah maupun Penyedia terkait dengan segala hal yang berkaitan dengan pengadaan barang atau jasa.
5. Meningkatkan sinergitas antar dinas atau organisasi perangkat daerah terutama berkaitan dengan pengadaan barang atau jasa sehingga tahapan-tahapan pengadaan dapat mengedepankan asas kemanfaatan dan prinsip-prinsip lain seperti efektif, efisien, dan profesionalitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Budi Arianto dan Vanessa Dasenta Demokracia, 2021, *Aspek Hukum Jasa Konstruksi*, Andi Offset, Yogyakarta.
- HR, Ridwan, 2018, *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, Rajagrafindo Persada, Depok.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB.
- Ramli, Samsul, 2013, *Bacaan Wajib Para Praktisi Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah*, Visimedia, Jakarta.
- Riawan Tjandra W., 2022, *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Kencana, Jakarta.
- , 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2023, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Kencana, Jakarta.
- , 2024, *Hukum Keuangan Negara*, Kanisius, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, 2019, *Sosiologi Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*, Rajagrafindo Persada, Depok.
- Sudikno Mertokusumo, RM., 2022, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta.
- Zainal Arifin Mochtar dan Eddy Hiariej, 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*, Rajawali Pers, Depok.

Jurnal

- Baihaki dan Rachman Arif. 2021, "Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah." *Modul Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1*. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Indonesia. <https://online.fliphtml5.com/srznq/whyd/#p=1> .
- Desak Putu Damayanti, 2025, "Analisis Jalur Kritis Pada Proses Pengadaan Jasa Konstruksi Paket 1 Pekerjaan Konservasi Pantai Candidasa Pinjaman JICA", *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa (JPBJ)*, Vol. 4, No. 1, April 2025, Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia. <https://journal.ifpi.or.id/index.php/jpbj/article/view/60>

- Edison Hatoguan Manurung, 2022, “Kontrak Konstruksi Infrastruktur Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi”, *Jurnal Legal Studies*, Vol.2. No. 2. 2022, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/ljsj/article/view/4302>
- Eka Septian, 2022, “Mekanisme Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi pada Tender Pekerjaan Konstruksi”, *Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2022, Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia. <https://journal.ifpi.or.id/index.php/jpbj/article/view/28>
- Fahrul Rizal, 2025, “Menakar Dampak Pagu Swakelola Infrastruktur Terhadap Pengurangan Kemiskinan di Aceh: Studi Empiris di 12 Kabupaten/Kota”, *Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa*, Vol. 4, No. 1, April 2025, pp. 39-44, Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia. <https://journal.ifpi.or.id/index.php/jpbj/article/view/63/53>
- Reni Faritawati, dkk. 2016, “Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintahan Kabupaten Siak Provinsi Riau”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 14, No. 2, September 2016, Fakultas Ekonomi Universitas Lancang Kuning. <https://media.neliti.com/media/publications/97962-ID-analisis-implementasi-anggaran-berbasis.pdf>
- Marsudi Dedi Putra, 2021, “Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Pancasila”, *LIKHITAPRAJNA Jurnal Ilmiah*, Volume 23, Nomor 2, September 2021, Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang. <https://share.google/KOlhJ5wjvqi9oMglD> .

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 24. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 67. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Bupati Bekasi Nomor 30 tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 30. Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi.

Wawancara

Advokat Romie Habie, S.H., M.H., Anggota Asosiasi Pengacara Pengadaan Barang dan Jasa, diwawancarai pada Sabtu, 25 Oktober 2025, pukul: 17.00 WIB di Pakuwon Mall Yogyakarta.

Yogi Herdiansyah, S.Sos., M.M. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bekasi, diwawancarai pada Senin, 20 Oktober 2025, pukul: 12.00 WIB, di kantor BPBJ Kabupaten Bekasi.

Skripsi

Alfonsus Salomo Rafel Sihombing, 2025, Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah bagi UMK melalui *e-procurement* di Kota Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Daffa Rachell Setyaputra, 2024, Pelaksanaan Prinsip Efektivitas dalam Pengadaan Barang atau Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Temanggung, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yohanes Baptista Adrian Bahi, 2023, Penerapan Prinsip Efektivitas dan Efisiensi dalam Pengadaan Barang atau Jasa Melalui Cara *E-Purchasing* di Pemerintah Kota Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui <https://kbbi.web.id/penerapan> , diakses tanggal 23 September 2025

Kamus besar bahasa Indonesia, diakses melalui <https://kbbi.web.id/asas>, diakses tanggal 23 September 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui <https://kbbi.web.id/kendala> , diakses tanggal 29 Oktober 2025

Newsroom Diskominfoantik, Pemkab Bekasi Genjot Pembangunan Infrastruktur Jalan di Seluruh Kecamatan, <https://www.bekasikab.go.id/pemkab-bekasi-genjot-pembangunan-infrastruktur-jalan-di-seluruh-kecamatan>, diakses 22 September 2025.

SPSE INAPROC Kabupaten bekasi, diakses melalui <https://spse.inaproc.id/bekasikab/lelang?kategoriId=2&tahun=2025&instansiId=D115&rekanan=&kontrak status=&kontrak tipe=> ,diakses tanggal 27 November 2025

LAMPIRAN

1. Dokumentasi dengan Bapak Yogi Herdiansyah, S.Sos., M.M.



2. Dokumentasi dengan Bapak Romie Habie, S.H., M.H.



3. Surat izin resmi penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bekasi



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Instagram: kesbangpolkabbekasi
Email: badankesbangpol.kab.bekasi@gmail.com

B E K A S I

Nomor : HM.04.04/899/Bakesbangpol/2024 Yth. **Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kab. Bekasi**
Sifat : Biasa
Lampiran :
Perihal : **Surat Keterangan Penelitian**

Bekasi, 13 Oktober 2025

Kepada

Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kab. Bekasi
di-

B E K A S I

Menindaklanjuti surat dari Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Nomor Surat: 20/V/CVD-FH, tanggal 7 Oktober 2025, perihal: Permohonan Izin Penelitian Tugas Akhir Skripsi, berkenaan hal tersebut di atas dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **DANIEL GUNAWAN**
Tempat/Tgl Lahir : Bekasi, 21-06-2004
NIM : 220514505
Jenjang/ Program Studi : Strata Satu (S1)/ Hukum
Perguruan Tinggi / Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Perum Bulak Kapal Permai Blok AH2 46 Rt 010 Rw 014 Kel/Desa Jatimulya, Kec. Tambun Selatan - Kab. Bekasi
No. Telp/ HP / Email : 0895-1253-1627/ danielgunawan2121@gmail.com

Bermaksud akan mengadakan penelitian, pengumpulan data dan wawancara dalam rangka melakukan Penyusunan Skripsi dengan judul: **"PENERAPAN ASAS KEMANFAATAN PADA PEKERJAAN KONSTRUKSI PENGADAAN BARANG ATAU JASA DI PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI"** yang akan dilaksanakan di lingkungan dan wilayah kerja Bapak/Ibu pimpin, adapun waktu pelaksanaan mulai tanggal **13 Oktober s/d 31 Oktober 2025**, apabila berkenan mohon kiranya kepada yang bersangkutan diberikan kemudahan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan sepanjang tempat penelitian memberikan izin;
2. Melaporkan kedatangan kepada Instansi dimaksud dengan menunjukan surat ini;
3. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan tujuan akademik;
4. Apabila diatas tanggal **31 Oktober 2025** kegiatan penelitian belum selesai, agar menyampaikan permohonan perpanjangan oleh instansi pemohon ditunjukan kepada Bupati Bekasi cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bekasi;
5. Setelah selesai melaksanakan kegiatan penelitian wajib melaporkan hasilnya kepada Bupati Bekasi Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bekasi;
6. Surat ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Demikian agar maklum terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Bupati Bekasi (sebagai laporan)